



Pemprov Canangkan Pembangunan Zona Integritas

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan mewujudkan Perangkat Daerah Anti Korupsi yang digagas oleh Inspektorat Kalbar, Senin (18/7). Pencanaan yang digelar di Balai Petiti Kantor Gubernur itu dibuka secara langsung oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji.

Adapun kegiatan pencanaan pembangunan zona integritas dan sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah itu dilaksanakan dalam rangka membangun dan mewujudkan perangkat daerah anti korupsi. Sebagaimana dengan grand design reformasi birokrasi periode 2020-2024. Dimana sasaran re-



BIRO ADPIM FOR PONTIANAK POST

PENCANANGAN: Gubernur Kalbar Sutarmidji membuka kegiatan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemprov Kalbar, Senin (18/7).

formasi birokrasi bertujuan mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

"Budaya antikorupsi pada setiap perangkat daerah diharapkan dibangun dan dikembangkan di lingkungan Pemprov Kalbar. Saya mendukung kegiatan pencanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Pemprov," ungkap Sutarmidji saat menyampaikan arahan.

Dengan pencanaan zona integritas ini, diharapkan adanya perbaikan dan komitmen sebagai sebuah langkah untuk mewujudkan ASN yang mempunyai integritas yaitu jujur dan taat kepada peraturan perundangan-undangan.

◆ Ke Halaman 15 kolom 5



Pemprov Canangkan Pembangunan Zona Integritas

Sambungan dari halaman 9

Midji sapaan karibnya juga berpesan kepada seluruh perangkat daerah agar dalam laporan keuangan selalu transparan. Termasuk dalam pengelolaan aset juga harus sesuai standar yang ditentukan.

"Maka saya minta perangkat daerah di lingkungan Pemprov untuk menggunakan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Kedepannya SPIP akan menghasilkan ASN handal, taat pada peraturan dan menciptakan iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi (clean government),

pelaporan keuangan pemerintah efektif dan efisien guna menciptakan tata kelola good government," tegasnya.

Adapun kegiatan pencanangan tersebut turut dihadiri oleh

Sekda Kalbar Harisson. Serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar dan seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar. (*bar/r*)